



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ALI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 146746

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.792.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/63 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/99 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
4. Tanah Seluas 3750 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000		
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/192 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	64.500.000
1. MOBIL, SUZUKI GC415V APV DLX MT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
2. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2024, HADIAH Rp. 39.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.470.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.430.185
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----



Sub Total	Rp.	1.877.900.185
III. HUTANG	Rp.	266.276.277
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.611.623.908

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.